

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sistem perbankan di Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran yang penting, yaitu memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil atau usaha mikro dan sektor informal, terutama di daerah pedesaan. Dengan membantu dalam memberikan pelayanan perbankan khususnya dalam pemberian pinjaman untuk menciptakan pekerjaan mandiri kepada rakyat kecil yang bekerja dalam sektor informal di kota maupun di daerah pedesaan, BPR berperan dalam membantu menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

Di Indonesia, BPR diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 1998, UU ini dibuat untuk menggantikan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU tersebut BPR didefinisikan sebagai “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Tabel 1.1 Penyaluran Kredit oleh BPR

No	Kredit yang diberikan	Periode
1	40.680.858.773	November 2011
2	41.099.515.666	Desember 2011
3	41.424.051.429	Januari 2012
4	42.484.760.843	Februari 2012
5	43.557.413.190	Maret 2012
6	44.472.354.714	April 2012

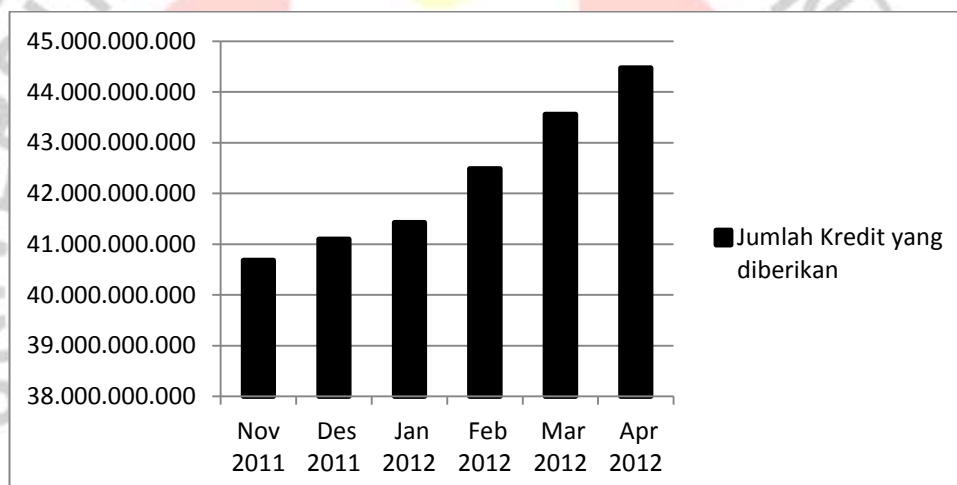
(Sumber : www.bi.go.id)

Imam Agus Suintri, 2013

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan tabel 1.1 tentang penyaluran kredit oleh BPR dapat diketahui bagaimana BPR memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dari besarnya jumlah kredit yang diberikan, dapat diketahui bahwa BPR memiliki peran dalam mengembangkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengingat BPR yang fokus dalam melayani UMKM. Untuk lebih jelasnya perkembangan jumlah kredit yang diberikan oleh BPR dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kredit yang diberikan oleh BPR



(Sumber : www.bi.go.id)

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh BPR selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut membuktikan pentingnya peranan BPR dalam menyokong usaha mikro, kecil, dan menengah. Pentingnya peranan BPR tersebut harus diimbangi dengan kinerja dari BPR itu sendiri. Maka dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR. Namun pada kenyataannya BPR belum memiliki standar akuntansi keuangan yang relevan. Standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR selama ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 tentang Akuntansi Perbankan yang berlaku bagi seluruh perbankan. Pernyataan ini berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penyusunan laporan keuangan mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1993. Pada Tanggal 1 Januari 2010, PSAK 31 dicabut dan digantikan dengan PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55).

Dengan diberlakukannya PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55), maka standar akuntansi bagi perbankan mengacu pada PSAK yang berlaku. Namun penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang masih tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR yang masih sederhana jika dibandingkan dengan Bank Umum. Selain kegiatan operasional yang sederhana, alasan lain adalah diperlukannya biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut, maka Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/37/DKBU-Penetapan Penggunaan standar akuntansi keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, menetapkan standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK ETAP karena SAK ETAP dipandang lebih sesuai dengan

kegiatan usaha BPR yang sederhana, dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SAK ETAP pada BPR dan apakah dengan mengimplementasikan SAK ETAP BPR dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas, maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SAK ETAP pada BPR di kota Bandung?
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada BPR di kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan pada BPR di kota Bandung?

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan pada BPR di kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada BPR di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pada BPR di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan pada BPR di kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberika kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akan penerapan SAK ETAP. Dalam hal pengembangan teori, hasil tinjauan pustaka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara empiris, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPR dalam mengevaluasi penerapan SAK ETAP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.